# HARUSKAH PEMBANGUNAN BERHENTI DILAKUKAN?

Oleh: Andrian Dolfriandra Huruta

## Abstract

This article aims to describe some efforts of every country worldwide to promote welfare of the society like economic, social, environment aspects without harming the environment or social life. There is an effort to support development thought some great event such as the UN conference on sustainable development (Rio+20). This effort creates millennium development goals and sustainable development goals. However this effort still creates some problems such as ecological, social conflict, inequality, security, poverty and etc. So that there are some action that we can do to reduce some problems such as increase the role of global citizen, development ethics and wisdom.

**Kata kunci:** Pembangunan, Etika Pembangunan, Masyarakat Global, Kearifan

## Pendahuluan

Dewasa ini kita diperhadapkan dengan banyak persoalan dan pandangan yang sangat paradoksal. Pada satu sisi, kita merayakan banyak kemajuan ekonomi, sosial dan budaya khususnya di berbagai belahan dunia yang melakukan pembangunan selama bertahun-tahun, di sisi lain kemiskinan bisa dikurangi secara signifikan. Akan tetapi, kita juga diperhadapkan dengan banyak gugatan atas berbagai usaha pembangunan yang bertahun-tahun telah menjadi sebuah ideologi, seperti laporan tentang kemiskinan, gizi buruk, ketimpangan, lingkungan dan sebagainya yang terus menghiasi surat kabar maupun jurnal. Dari persoalan inilah yang memaksa manusia untuk berpikir mengenai gagasan pembangunan berkelanjutan yang berangkat dari berbagai fenomena yang telah terjadi.

Sen (dalam Winarno, 2013) lewat karyanya yang berjudul *development as freedom* menyebut "*development can be seen as a process of expending the real freedoms that enjoy people*". Pandangan ini pada

hakikatnya mengarah kepada kebebasan politik, kesempatan-kesempatan ekonomi, peluang-peluang sosial, jaminan keterbukaan dan perlindungan keamanan. Sen dalam diskusinya tentang pembangunan jauh lebih luas karena sampai menyentuh dimensi sosial dan politik, sedangkan definisi pembangunan klasik cenderung mengejar pertumbuhan dan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan material masyarakat.

Pada zaman pencerahan, Shiva (dalam Winarno, 2013) menyebut pembangunan berkelanjutan berpusat pada kesucian dua kategori yaitu ilmu pengetahuan modern dan pembangunan ekonomi. Definisi ini ingin mengingatkan kita bahwa kedua kategori ini merupakan akar penyebab dari begitu banyaknya persoalan kehidupan manusia dan lingkungan.

Dari kedua pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan sejatinya tidak bersifat mikro, namun lebih bersifat makro yang menyentuh berbagai aspek kehidupan dan bersifat komprehensif, sehingga pembangunan yang sejati adalah proses menuju pada kebebasan dan lebih bertanggungjawab.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi negara-negara dunia ketiga berada dalam keadaan miskin, namun banyak yang kaya akan sumber daya alam dengan jumlah penduduk besar dan inilah yang bagi *multinational corporation* (MNCs) disebut dengan *captive market*[1]. Situasi kehidupan penduduk dunia saat ini sedang mengalami penindasan secara ekonomi, politik dan budaya, yang menyebabkan kualitas kehidupan masyarakat memburuk, mengalami krisis pangan, air bersih, sanitasi yang buruk. Keadaan ini dialami oleh tidak kurang dari 2,2 milyar penduduk dunia. Situasi ekstrim inilah yang coba di ekploitir oleh negara-negara maju untuk dan atas nama keprihatinan semu yang berupaya untuk melakukan intervensi melalui instrumen *millenium development goals* (MDGs)[2] untuk menguasai negara-negara dunia ketiga atau negara berkembang. Ibarat seekor itik yang mati karena kehausan ketika

[1] *Captive market* adalah suatu pasar di mana konsumen potensial menghadapi jumlah pemasok yang sangat terbatas dan kompetitif. Mereka akan membeli apa yang tersedia dan atau atau tidak membuat pembelian sama sekali. *Captive market* mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Hal ini berlaku untuk setiap pasar di mana ada monopoli atau oligopoli. Contoh: makanan di bioskop, bandara, arena olahraga, penjara dan sebagainya.

[2] MDGs terdiri dari (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; (2) mencapai dasar universal dan memberdayakan, (3) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

berenang di danau, begitulah kira-kira metafora yang tepat untuk menggambarkan kondisi paradoksial yang menimpa negara dunia ketiga (*the third world countries).*

*Millennium development goals* tidak terlepas dari skenario global yang dimainkan oleh konspirasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang. Dengan adanya MDGs ini, situasi kelesuan pasar global dapat diperbaiki untuk kepentingan memasok barang dan jasa hasil industri mereka ke negara-negara berkembang yang secara pararel menghisap kekayaan sumber daya alam, mineral, energi dan bunga hutang. Hegemoni kepentingan global ini telah menawan kedaulatan bangsa dan kemandirian warga negara, sehingga masa depan dan kesejahteraan masyarakat menjadi tergadai dan ditentukan oleh pihak lain.

Kuatnya peran korporatokrasi yang mengatasnamakan kepri-hatinan dan demokrasi telah melemahkan dan membuat pemerintah di negara-negara berkembang menjadi tidak berdaya, sehingga modal mendapatkan pelayanan yang mutlak untuk mendukung bekerjanya mekanisme pasar yang akan memberikan keuntungan kepada negara maju. Pemerintah didesak untuk sibuk melakukan privatisasi, liberalisasi dan deregulasi,sehingga masyarakat di negara berkembang menjadi terperangkap dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Sagaroa (2006) menyebut negara-negara maju berkomitmen untuk memberikan bantuan bagi penanggulangan kemiskinan dengan target alokasi 0,7 persen dari produk nasional bruto mereka untuk negara-negara miskin melalui ODA (*overseas development assistance*). Pada kenya-taannya hanya 5 negara yang memenuhi target tersebut seperti Denmark, Luxemburg, Norwegia, Belanda dan Swedia, namun tidak ada satupun dari negara-negara maju yang tergabung dalam G8[3] memenuhi target tersebut.

Implikasi dari hal tersebut menunjukkan suatu kondisi keprihatinan yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang. Di sisi lain, negara-negara maju hadir guna mentuntaskan persoalan krusial yang menimpa negara-negara sedang berkembang namun mereka cenderung memiliki kepentingan tertentu. Dapat dikatakan bahwa negara-negara

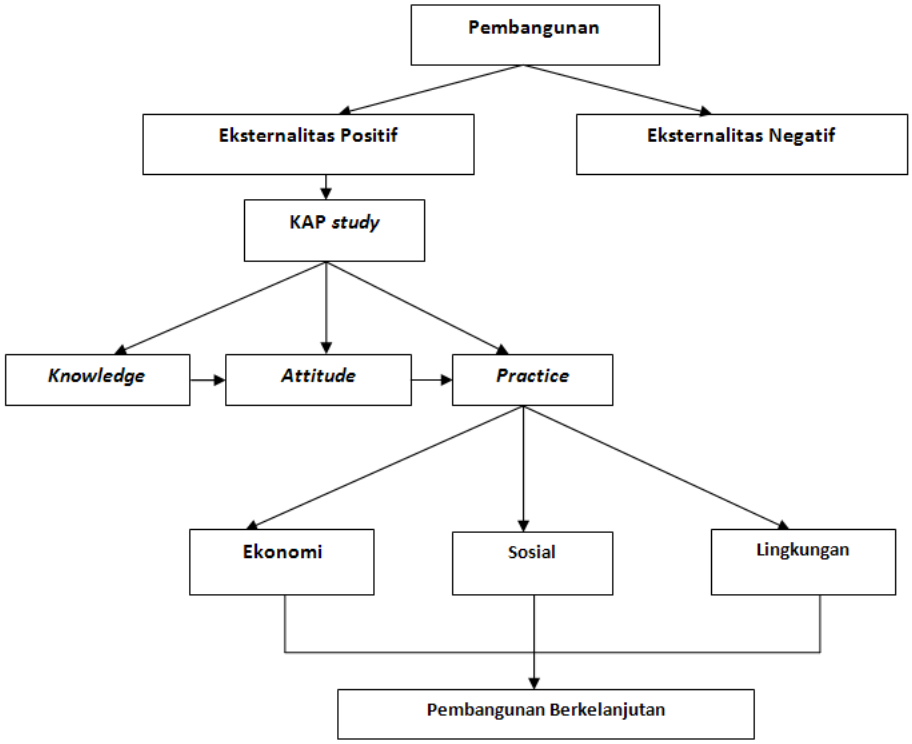
[3] G8 (*group of eight* atau kelompok delapan) adalah koalisi delapan negara termaju di dunia seperti Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat (G6, 1975), Kanada (G7, 1976) dan Rusia (tidak ikut dalam seluruh acara), serta Uni Eropa. Peristiwa terpenting dalam G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahunan yang dihadiri para kepala negara dan pejabat-pejabat internasional, meski selain itu masih ada pertemuan-pertemuan dan penelitian-penelitian kebijakan lainnya yang lebih kecil.

maju hadir bagai sosok yang berwajah ganda, sehingga begitulah kira-kira metafora yang paling tepat untuk menggambarkan peran Negara tersebut. Pertanyaannya adalah adakah pertimbangan etis terkait dengan berbagai aspek pembangunan seperti pemanfaatan sumber daya, distribusi pendapatan dan kelestarian lingkungan?

## Definisi Kerja (*working definition)*

Considine (2005: 105-106) menyebut dewasa ini walaupun secara makro menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara meningkat namun pada sisi yang lain terdapat berbagai persoalan krusial yang menimpa berbagai negara yang coba didamaikan lewat mekanisme kebijaksanaan seperti pelanggagan hak asasi manusia, tuntutan melawan ketidakadilan para tuan tanah, perang, perceraian, adopsi, deforestrasi, dan lain sebagainya. Masalah sosial lainnya yang tidak kalah peliknya adalah terkait dengan hak atas tanah dari penduduk asli, akses terhadap teknologi, kesehatan, keamanan, dan pensiun dari pegawai.

Esensi pembangunan tidak serta merta hanya berorientasi pada perilaku ekonomi saja. Namun, pembangunan berkelanjutan meng-isyaratkan keberlanjutan dari beberapa perilaku seperti lingkungan dan sosial. Ketiga perilaku ini (ekonomi, sosial dan lingkungan) merupakan elemen yang terintegrasi. Oleh karena melihat adanya kompleksitas dalam pembangunan maka penulis menggunakan KAP (*knowledge*, *attitude*, and *practice*) *study*. Artinya pengetahuan (*knowledge*), sikap atau *attitude* (keyakinan, kepedulian dan kepercayaan) warga global akan membimbing perilaku (*practice*) yang dicerminkan dalam kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan. Perilaku inilah yang akan bermuara pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menuangkannya dalam sebuah skema yang disebut sebagai definisi kerja (*working definition*):




Gambar 1. Definisi Kerja

Jika dilihat secara sepintas, gambar ini tentu menjanjikan sebuah harapan yang akan menciptakan keseimbangan antara ketiga aspek ini. Namun, faktanya adalah tidak semudah yang dibayangkan seperti pada gambar ini. Dalam teori mungkin bisa terjadi keseimbangan namun dalam aras implementasi sangat sulit untuk mencapainya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (2013) melaporkan bahwa peningkatan bencana ekologi semakin tinggi frekuensinya seiring dengan pembangunan yang mengedepankan eksploitasi sumberdaya alam yang menuju pada penghancuran sumber daya hutan. Oleh karena itu, antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial memiliki hubungan yang positif. Artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka degradasi lingkungan dan ketidakadilan sosial akan semakin meningkat pula.

Belajar dari kondisi tersebut maka ada suatu keyakinan bahwa sebenarnya ketiga aspek tersebut dapat seimbang dalam aras implementasi. Untuk menciptakan kondisi yang seimbang pada ketiga aspek ini maka membutuhkan sinergi dari tiga elemen yang tidak lain adalah pemerintah,

swasta dan masyarakat. Dalam hal ini, keseimbagan bisa terjadi apabila ada kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan tersebut hendaknya diikuti oleh kesadaran secara komunal dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pertanyaannya apakah ketiga elemen ini memiliki kesadaran yang sama? Terkadang sudut pandang dari ketiga elemen ini saling berbeda satu sama lain. Perbedaan ini berkaitan dengan hal-hal fundamental seperti apakah sumberdaya yang bersifat tidak terbarukan hanya boleh kita gunakan dalam jumlah yang sedikit? Apakah sumberdaya yang bersifat tidak terbarukan sama sekali tidak boleh kita gunakan? Berapakah jumlah ideal dari sumber daya yang bersifat tidak terbarukan yang harus kita gunakan? Apakah sumber daya yang bersifat terbarukan boleh kita gunakan dalam jumlah yang banyak? Apakah sumberdaya yang bersifat terbarukan sama sekali tidak boleh kita gunakan? Berapakah jumlah ideal dari sumberdaya yang bersifat terbarukan yang harus kita gunakan? Berapakah jumlah sumberdaya (tidak terbarukan maupun terbarukan*)* yang harus kita simpan? dan Dimanakah batasan antara kebutuhan dan keinginan? Dari berbagai pertanyaan tersebut tentunya menuntut adanya suatu pertimbangan etis terkait dengan pilihan. Masalah pembangunan memang sangat terkait dengan pilihan, karena jika kita salah menentukan pilihan maka kita harus siap menerima dampaknya.

Sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita pelajari, yang salah satunya berasal dari komunitas Dalai di dataran Tibet yang mengajarkan bahwa *everything is design on your mind.* Artinya harus ada kesadaran secara komunal untuk bersikap kritis dalam melakukan pembangunan.

## *Sustainable Development Goals*: Apakah Merupakan Solusi?

Kartakusuma (2012) menyebut bahwa selama lebih dari satu dekade*, millennium development goals* (MDGs) telah mendominasi paradigma pembangunan. Di tahun 2015, target dan indikator anti kelaparan yang tercantum dalam MDGs akan berakhir. Laporan satuan tugas perserikatan bangsa-bangsa yang berjudul *realizing the future that we want for all* (mewujudkan masa depan yang kita butuhkan untuk semua) mengakses kemajuan yang impresif untuk mencapai MDGs, walaupun tantangan-tantangan pencapaian masih ada di beberapa negara. Laporan ini juga mengidentifikasi beberapa kelemahan konseptual dari MDGs, kebanyakan mengenai kegagalannya untuk mengatasi lingkungan

hidup secara lintas sektoral dan kebutuhan dari beberapa tujuan untuk memperdalam dampaknya (misalnya, akses terhadap pangan yang bernutrisi ketimbang sekedar mencukupi jumlahnya).

Pada saat yang bersamaan Kolumbia, Guatemala, Peru dan Uni Emirat Arab menyerukan untuk merubah paradigma menuju konsep yang koheren dan berdaya jangkau luas yang akan memandang kesehatan dan produktivitas lingkungan hidup sebagai isu yang penting. Negara-negara ini kemudian menyerahkan proposal tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam pembukaan "Rio+20" konferensi PBB mengenai pembangunan berkelanjutan tahun 2012. Dokumen hasil "Rio+20" memperkuat posisi ini dengan memberikan mandat untuk mengembangkan SDGs kepada majelis umum perserikatan bangsa-bangsa yang terdiri atas kelompok kerja terbuka dengan 30 anggota. Dalam proses paralel, Ban Ki-moon[4] mengadakan sebuah pertemuan tingkat tinggi pihak penting untuk mengeksplorasi kerangka kerja umum untuk agenda pembangunan pasca 2015.

Perumusan yang jelas mengenai esensi dari SDGs telah disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi "Rio+20" pada bulan Juni 2012 yang lalu. Isu-isu yang akan diangkat sebagai indikator dalam SDGs yaitu (1) memerangi kemiskinan; (2) mengubah pola konsumsi; (3) mendorong pembangunan pemukiman manusia yang berkelanjutan; (4) keaneka-ragaman hayati dan hutan; (5) lautan; (6) sumberdaya air; (7) memajukan ketahanan pangan dan (8) energi, termasuk dari sumber terbarukan.

Dalam dokumen *the future we want* terdapat 3 (tiga) isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu (i) ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan; (ii) kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan dan (iii) kerangka kerja untuk tindakan dan pelaksanaan). Kerangka aksi tersebut termasuk penyusunan *sustainable development goals* (SDGs) *post-2015* yang mencakup 3 pilar pembangunan berkelanjutan secara inklusif, yang terinspirasi dari penerapan *millennium development goals* (MDGs).

Sementara itu, Suara Merdeka Online (2012) melansir bahwa kelompok konservasi *Greenpeace* menyebut konferensi tingkat tinggi ini telah selesai sebelum dimulai. Artinya konferensi tingkat tinggi yang secara resmi dikenal sebagai konferensi perserikatan bangsa-bangsa untuk pembangunan berkelanjutan, secara perlahan-lahan telah menghapus

[4]Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

komitmen dan target penting untuk lingkungan. Kelompok *oxfam*[5] bahkan menyebut konferensi tingkat tinggi ini sebagai konferensi *hoax*[6] kerena terlalu banyak kepentingan yang bermain di dalamnya, sehingga sangat sulit ditemukan upaya pemecahan berbagai persoalan ekonomi, keadilan dan lingkungan.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan dan sedang digagas seperti tujuan pembangunan milenium dan tujuan pembangunan berkelanjutan ternyata masih menimbulkan perdebatan yang sangat alot antara kalangan elit dan para ahli lingkungan. Melihat kondisi ini, masyarakat global menjadi tdak peduli dan cenderung apatis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah sampai kapankah ada kesamaan paradigma untuk menghasilkan solusi dalam menangani pesoalan krusial yang tengah melanda dunia saat ini?

## Kebijakan dan Falsifikasi Karl Raimund Popper

Persoalan yang paling krusial saat ini adalah sebagian besar pemerintah di belahan dunia memiliki paradigma *"growth now, clean up later"* yang berarti bahwa ketika terjadi degradasi sebagai akibat dari pembangunan maka pemerintah akan segera melakukan tindakan konkrit seperti normalisasi, revitalisasi, rehabilitasi dan lain sebagainya.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa memang pemerintah telah terjebak dalam falsifikasi Popper. Pembangunan yang cenderung bertumpu pada dinamika falsifikasi ini jelas akan selalu mengorbankan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Kegiatan ekstraktif akan segera diberhentikan begitu terbukti merusak lingkungan. Apabila tindakan semacam ini terus dilakukan maka alam hanya akan menjadi kelinci percobaan hingga ditemukannya suatu metode baru. Bagi Popper, pengetahuan maju bukan karena akumulasi pengetahuan, melainkan lewat proses eliminasi yang

[5] Organisasi nirlaba dari Inggris yang berfokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi, bekerjasama dengan mitra lainnya untuk mengurangi penderitaan di seluruh dunia. Organisasi ini terdiri dari 15 organisasi dari 98 negara di dunia. Didirikan pada tahun 1942 di Oxford. Oxfam berdedikasi untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan di seluruh dunia.

[6] Sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian yang sejatinya.

semakin keras terhadap kemungkinan kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu, Popper menyebutnya sebagai epistemologi pemecahan masalah. Pertanyaannya adalah sampai kapan akan ditemukan pemecahan masalah yang benar-benar tidak merusak lingkungan? Oleh karena itu, persoalan ekonomi, sosial dan etika lingkungan harus benar-benar diperhatikan dalam proses pembangunan.

Etika pembangunan mengisyaratkan adanya pertimbangan normatif dan etis dalam pembentukan tujuan, strategi dan kebijakan serta implementasinya untuk mencapai cita-cita dalam pembangunan di suatu negara. Pertimbangan etis ini menyangkut berbagai aspek pembangunan antara lain seperti kebijakan alokasi dan pemanfaatan sumberdaya atau aset, distribusi atau redistribusi pendapatan, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Salah satu contoh konkrit dalam alokasi sumber daya yaitu mengisyaratkan harus adanya pertimbangan etis yang terkait dengan bagaimana mekanisme alokasi, dialokasikan kepada siapa dan berapa banyak yang dialokasikan? Indikator etis yang digunakan sebagai bahan pertimbangan ini merujuk kepada ukuran normatif moral seperti agama, pertimbangan kemanusiaan, nurani, kearifan (*wisdom)* yang diterima oleh masyarakat luas sebagai norma, sampai pada pertimbangan normatif formal seperti falsafah negara dan konstitusi. Mahatma Gandhi menyebut bahwa terdapat tujuh dosa sosial yang paling mematikan yaitu (1) kesejahteraan tanpa bekerja; (2) kesenangan tanpa nurani; (3) pengetahuan tanpa karakter; (4) perdagangan atau bisnis tanpa moralitas; (5) ilmu tanpa kemanusiaan; (6) agama tanpa pengorbanan dan (7) politik tanpa prinsip[7]. Pertanyaannya bagaimana dengan praktek pada dewasa ini, apakah memang dalam kebijakan pembangunan di belahan dunia telah memasukkan pertimbangan etika?

Salah seorang pengikut Gandhi yang merupakan pemikir ekonomi non-barat adalah Schumacher. Dalam salah satu bab yang berjudul *Buddhist Economics*, Schumacher menjelaskan bahwa ajaran buddha tradisional menolak kehadiran mesin yang sejatinya mengurangi jumlah tenaga kerja, produksi perakitan, perusahaan multinasional berskala besar, perdagangan luar negeri dan masyarakat konsumen.[8]

[7] Covey (dalam Kameo, 2013)
[8] Schumacher (1973: 44 – 51) dalam Skousen (2005: 10 - 11)

## Peran Warga Negara Global (*Global Citizen Roles*)

Shapcott (2010: 3, dalam Winarno 2013: 335) menyebut etika global hadir untuk menjawab tiga pertanyaan fundamental yaitu (1) apakah kita secara fundamental mempunyai tanggung jawab moral yang berbeda dengan rekan-rekan se-negara? (2) apakah sifat alamiah seperti kewajiban atau tanggungjawab yang kita miliki untuk orang yang berasal dari luar atau perbatasan dimungkinkan menjadi sebuah prinsip? dan (3) bagaimana kita dapat menterjemahkan prinsip-prinsip itu agar dapat diterapkan?

Ketiga pertanyaan ini kemudian melahirkan kedua kubuh yaitu kosmopolitanisme dan komunitariaisme. Kosmopolitanisme melihat bahwa setiap orang mempunyai kewajiban yang sama sebagai warga negara dunia, sedangkan komunitarianisme melihat bahwa kesetiaan dan nilai-nilai tidak bisa dilepaskan dari komunitas. Dengan kata lain, komunitaslah yang paling penting.

Penulis melihat bahwa dewasa ini kosmopolitanisme harus menjadi pionir dalam merespon segala hasil dari pembangunan, baik berupa eksternalitas positif maupun negatif, sehingga pengetahuan dan sikap dari warga negara global sangat menjadi sangat penting guna menuntun perilaku mereka dalam merespon segala kewajiban atau tanggungjawab.

## Kesimpulan

Upaya pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah harapan yang kelihatannya sangat mudah untuk didebatkan oleh semua kalangan, namun pada tataran implementasi tidak semudah itu. Realita yang terjadi adalah proses dari pembangunan selalu dan cenderung mengabaikan lingkungan dengan menciptakan kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Berbagai cara telah ditempuh oleh para pemimpin dunia lewat konvensi dan konferensi tingkat tinggi yang diprakarsai oleh negara-negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa mulai dari konferensi tingkat tinggi di Stockholm, *millenum development goals* sampai *sustainable development goals*. Akan tetapi, semua ini masih menyisakan berbagai persoalan pelik terkait dengan pencapaian dari butir-butir tujuan pembangunan milenium dan diperkuat dengan adanya perdebatan yang sangat serius diantara berbagai kalangan mulai dari aktivis lingkungan, ahli

lingkungan dan petinggi-petinggi lembaga perserikatan bangsa-bangsa terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Jika sejatinya proses pembangunan akan selalu menimbulkan resiko maka haruskah kita berhenti melakukan pembangunan? Tentu pembangunan harus terus dilakukan, sehingga peran dari warga negara global, etika pembangunan dan kearifan merupakan solusi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

## Implikasi Kebijakan

Pada masa transisi ini sudah saatnya bagi negara-negara di dunia untuk memiliki paradigma seperti (1) kekuasaan ekonomi dan politik dari pemerintah hendaknya digunakan seutuhnya demi kepentingan kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan; (2) mengganti paradigma pembangunan lama seperti mengejar pertumbuhan ekonomi, sentralisasi dan sektoral dengan perspektif pembangunan kontemporer seperti pemerataan pendapatan lewat redistribusi pendapatan yang *fair* dan mengedepankan pembangunan lewat pelestarian, sehingga arah pembangunan dikemudikan sesuai dengan logika yang benar sebagai sebuah proses perubahan sosial berdasarkan tata nilai tertentu di dalam masyarakat dan (3) meningkatkan partisipasi dan atau peran serta dari warga negara global untuk lebih peka terhadap persoalan keberlanjutan lingkungan, pemerataan, sosial dan sebagainya.

## Referensi

Considine, Mark. 2005. *Making Public Policy: Institutions, actors, and strategies*. United Kingdom: Polity Press. G5 Bridge Street. Cambridge CB2 1UR.

Kartakusuma, D, A, 2012. "Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): Masa Depan Yang Kita Inginkan". (http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/#sthash.roGaOerM.dpuf). Diunduh tanggal 12 Mei 2014.

Kameo, D, D, 2013. *Pembangunan Berkelanjutan: Economic and Social Aspects*. Bahan Kuliah Pembangunan Berkelanjutan di Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Naim, M. 2000. "Washington Consensus or Washington Confusion?", *Foreign Policy Magazine.* No. 18, pp 86-103.

Rogers., *et al*, 2008. *An Introduction to Sustainable Development.* London: Glen Education Foundation.

Sagaroa, Y, 2006. "Tambang dan Kemikinan di Sumbawa (Perlukah Investasi Tambang di Sumbawa"), makalah, disampaikan pada *Diskusi Reguler HMI Cabang Sumbawa*, 24 Desember 2006.

Rakyat Merdeka Online, 2012. *Aktivis Kritik Hasil KTT Rio+20*. (http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=68389). Diunduh tanggal 12 Mei 2014.

Schumacher, E, F, 1973. *Kecil Itu Indah, Terjemahan*. Jakarta: LP3ES.

Skousen, Mark, 2001. *Sang Maestro "Teori-Teori Ekonomi Modern": Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Prenada.

Winarno, Budi, 2013. *Etika Pembangunan*, Yogyakarta: Centre for Academic Publishing Service.